

# Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Implementation Of The Kampung KB in Pangkajene Regency And The Islands

Hasriani<sup>1</sup>, Rabina Yunus<sup>2</sup>, Hamsinah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar

email : [anibkkbn@gmail.com](mailto:anibkkbn@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program Kampung KB. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada faktor-faktor apa saja yang menentukan proses pelaksanaan program kampung KB. Program Kampung KB merupakan program pemerintah pusat sebagai wujud dari agenda prioritas pembangunan Nawacita periode 2015-2019. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Pangkajene dan kepulauan dengan mengambil dua sampel lokasi Kampung KB yaitu di kecamatan Bungoro sebagai sampel untuk kecamatan daratan dan kecamatan Tupabiring Utara sebagai sampel untuk kecamatan kepulauan. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 16 orang, dengan kriteria informan; Pimpinan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Pimpinan DPPKB Kab Pangkep, Penyuluh KB dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini. Data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan teori Miles dan Huberman dengan tiga langkah yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator implementasi kebijakan menurut Merilee S Grindel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek type manfaat dan perubahan yang diharapkan merupakan aspek pendukung dan dianggap sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Program Kampung KB dapat dinyatakan berhasil, sedangkan aspek sumber daya yang digunakan masih perlu dibenahi karena dengan alokasi anggaran dan dukungan sarana prasarana dari pemerintah pusat, penyuluh KB diharapkan dapat lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan program ini.

**Kata Kunci:** implementasi; keluarga berencana; kebijakan;

## Abstract

This study aims to determine the process of implementing the Kampung KB program. This research will focus on what factors determine the process of implementing the village family planning program. The Kampung KB program is a central government program as a manifestation of the Nawacita development priority agenda for the 2015-2019 period. This research was conducted in Pangkajene

and archipelago districts by taking two samples of KB village locations, namely in Bungoro sub-district as a sample for mainland sub-district and North Tupabiring sub-district as a sample for archipelago sub-district. The number of informants in this study were 16 people, with the criteria of informants; The leadership of the BKKBN of South Sulawesi Province, the leadership of the DPPKB of Pangkep Regency, the Family Planning Counselor and the community. This study uses a qualitative research method with a case study approach. Primary data were collected through interviews with informants, while secondary data were obtained from documents relevant to this research. Primary and secondary data were then analyzed using Miles and Huberman's theory with three steps, namely data condensation, data presentation, and drawing conclusions or verification. The indicators used in this study are indicators of policy implementation according to Merilee S Grindel. The results showed that the aspects of the type of benefits and expected changes were supporting aspects and were considered to have run as expected, so it can be said that the implementation of the Kampung KB Program could be declared successful, while the aspects of the resources used still needed to be addressed because of the budget allocation and support. facilities and infrastructure from the central government, family planning instructors are expected to be more creative and innovative in implementing this program.

**Keywords:** implementation; family planning; policy

## Pendahuluan

Kampung KB merupakan program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sebagai wujud dari agenda prioritas pembangunan Nawacita periode 2015- 2019. Program tersebut merupakan implementasi dari tiga agenda prioritas sekaligus yakni agenda prioritas ke-3 Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, agenda prioritas ke-5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia, serta agenda prioritas ke-8 Revolusi Karakter Bangsa melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Ramadhani 2020). Pembentukan kampung KB yang digunakan sebagai solusi untuk menekan angka pertumbuhan penduduk dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Program kampung KB merupakan salah satu realisasi dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan indikator pencapaian program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Ketercapaian program ini dapat dinilai dari beberapa aspek yaitu aspek pengendalian kuantitas penduduk dan aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya. Aspek kedua ini dapat dinilai dari beberapa indikator yakni peningkatan pengguna KB baru, peningkatan jumlah ibu hamil dan menyusui yang mendapatkan pelayanan kesehatan, peningkatan jumlah remaja yang aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-R), penurunan jumlah perempuan yang buta aksara, peningkatan

partisipasi keluarga pra sejahtera dan KS-1 dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)(Zuhriyah, Indarjo, and Raharjo 2017).

Program Kampung Keluarga Berencana (KB) dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya adalah; (1) Program Keluarga Berencana (KB) tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era orde baru; (2) Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat Kampung atau yang setara melalui program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas; (3) Penguatan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang dikelola dan diselenggarakan dari oleh dan untuk masyarakat; (4) Mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (5) Mengangkat dan menggairahkan kembali program Keluarga Berencana (KB) guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi terjadi pada tahun 2020-2030(Bachtiyar and Wibawani 2017).

Manfaat Kampung KB dapat membangun masyarakat berbasis keluarga melalui delapan fungsi keluarga dan mensejahterakan masyarakat melalui integrasi program lintas sektor. Bila tak dicegah dengan program keluarga berencana (KB), penduduk Indonesia naik dua kali lipat dalam rentang 1990-2020. Tahun 1990 sebanyak 178,6 juta jiwa; tahun 2000 205 juta jiwa, bila tanpa KB 285 juta jiwa, 80 juta kelahiran tercegah; tahun 2010 240 juta jiwa, bila tanpa KB 340 juta jiwa, 100 juta kelahiran tercegah. Serangan bukan hanya perang, tapi juga ledakan penduduk tak terkendali(Rosidah 2018).

Pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elsa Lettiyani/ Universitas Indo Global Mandiri. Palembang/2020. Dengan Judul Penelitian Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana ( KB ) di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT)(Lettiyani, Isabella, and Kencana 2020), Memperlihatkan hasil penelitian bahwa; Disposisi dalam pelaksanaan sikap implementor dan kelompok sasaran sudah cukup baik dalam merespon program kampung KB, hanya saja pengetahuan dan pemahaman implementor yang berada di Desa Sribunga belum begitu optimal, yang membuat kegiatan pelaksanaan program belum berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan. (4) Struktur birokrasi dalam pelaksanaan SOPnya berpedoman pada buku petunjuk teknis kampung KB dan fragmentasi telah terstruktur.

Sedangkan penelitian oleh Arizqi Istiadi/ Universitas Negeri Surabaya/2012 dengan judul penelitian Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Studi Pada Kelompok Sasaran Keluarga Dengan Remaja di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk). Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap indikator di dalam teori tersebut yaitu (1) komunikasi yang berisikan transmisi yang dilakukan dengan sosialisasi berupa undnagan sosialisasi di balai desa dan di berikan pembekalan, kejelasan informasi masih belum dipahami betul oleh masyarakat, dan konsistensi program Kampung KB di

lakukan dengan berdasarkan Juknis Kampung KB (2) sumber daya yang berisikan sumber daya manusia dengan jumlah yang sudah mencukupi, anggaran yang didapatkan berasal dari BKKBN Provinsi, APBD, serta ADD, sementara fasilitas yang diberikan yaitu berupa tempat kegiatan dan juga tambahan buku binaan untuk para kader (Istiadi 2017)

Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) dan rencana strategis BKKBN tahun 2015-2019 sejalan dengan renstra B. Isu Strategis Berbagai isu strategis yang berkembang di Sulawesi Selatan saat ini dan perlu mendapat perhatian dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, serta kebijakan program/kegiatan pada Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan 2020-2024 diantaranya adalah (BKKBN Sulawesi Selatan 2020):

Isu strategis terkait pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; bonus demografi; Pembangunan Sulawesi Selatan dalam periode tahun 2020-2024 ditujukan untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu SDM yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan diarahkan di antaranya melalui peningkatan produktivitas angkatan kerja, serta peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Widodo and Anam 2019).

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang turut ambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan program kampung KB ini. Program ini telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sejak tahun 2018, salah satu wilayah kampung KB berada di Desa Bulu Cindea Kecamatan Bungoro. Keberadaan kampung KB di wilayah ini dijadikan sebagai role mode bagi kampung KB lainnya. Kampung KB percontohan tersebut berhasil mengelola dan mengoptimalkan potensi yang ada. Keberadaan kampung KB percontohan ini menjadi sangat penting, karena profil serta data dan informasi terkait program Keluarga Berencana terekam baik, sesuai dengan harapan pemerintah pusat saat pencaangan program ini. Sehingga keberhasilan kampung KB percontohan dapat menjadi trigger bagi 24 kampung KB lainnya di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk memaksimalkan potensi yang mereka miliki masing-masing. Dalam perkembangannya, tujuan kampung KB untuk jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, utamanya pada masyarakat pesisir dan pedesaan. Komitmen dan partisipasi lintas sektor serta masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan program ini.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative approach) (Samad, Erdiansyah, and Wulandari 2020). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami sejauh mana program kampung KB terimplementasi di lapangan, dengan pendekatan kualitatif akan terjalin komunikasi yang interaktif kepada masyarakat sebagai sasaran program. Selain itu pendekatan kualitatif dipilih karena lebih

memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada terkait program kampung KB di lokasi penelitian, sehingga dapat menghasilkan temuan pengetahuan, rekonstruksi fenomena dan hipotesis ilmu baru.

Tahapan proses diawali dengan menentukan lokasi penelitian. Dipilih dua lokasi penelitian yaitu kampung KB Desa Bulu Cindea Kecamatan Bungoro dan Desa Mattiro Bintang Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. kedua wilayah penelitian itu memiliki karakteristik wilayah dan masyarakat yang berbeda. Desa Bulu Cindea merupakan desa percontohan kampung KB untuk wilayah Kabupaten Pangkep dan berada di wilayah daratan. Sedangkan Mattiro Bintang Kecamatan Liukang Tuppabiring Utara berada di wilayah kepulauan dengan sumber daya manusia masih terbatas untuk menjalankan program ini.

Data diperoleh dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada para informan (Sukino et al. 2019). Informan dipilih dengan sengaja dan terdiri dari dua kelompok informan, kelompok informan pertama dianggap memahami program ini dengan baik; Pimpinan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Pangkep dan Penyuluh KB pada kedua wilayah tersebut. Sedangkan kelompok informan kedua adalah masyarakat sebagai sasaran program kampung KB. Data sekunder berasal dari dokumen penunjang, buku panduan program kampung KB, hasil penelitian sebelumnya serta informasi resmi dari BKKBN pusat, Provinsi maupun Kabupaten. Keseluruhan informan berjumlah 16 orang.

Hasil dari kedua sumber data ini kemudian diolah menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan (focusing), penyederhanaan (simplifying), peringkasan (abstracting), dan transformasi data (transforming).

Fokus penelitian diarahkan kepada indikator implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grildell: 1) Kepentingan yang dipengaruhi (interest effected), 2) Tipe Manfaat, 3) Perubahan yang diharapkan (extent of change visioned), 4) Jarak pengambilan keputusan (site of decision making), 5) Pelaksana program (program implementator), 6) Sumber daya yang digunakan (resources committed). Namun dalam penelitian ini hanya akan melihat pada aspek kepentingan yang dipengaruhi, Tipe manfaat dan Perubahan yang diharapkan.

## Hasil dan Pembahasan

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi berkaitan dengan kebijakan spesifik sebagai respon khusus atau tertentu terhadap masalah-masalah spesifik dalam masyarakat (Hill and Hupe 2002). Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-

undang. Sebagaimana dinyatakan Ripley dan Franklin (Winarno 2007), implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau jenis keluaran yang nyata (tangible output). Pressman dan Wildavsky memahami implementasi kebijakan sebagai kegiatan menjalankan kebijakan (to carry out), memenuhi janji-janji sebagaimana disebutkan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to produce), dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan (to complete) (Sulistiyastuti 2012).

Warwick menyebutkan implementasi kebijakan sebagai transaksi sumber daya. Untuk menjalankan program, implementator harus berhubungan dengan tugas-tugas, lingkungan, klien, dan kelompok terkait. Hill and Hupe memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat (Hill and Hupe 2002). Dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah formulator dan implementator dapat berintegrasi sebagai aktor kebijakan atau tidak. Pertanyaan berikutnya adalah apakah formulator memiliki legitimasi membuat keputusan atau memiliki peran yang lebih besar daripada implementator atau tidak. Jika tidak, Hill dan Hupe meragukan apakah implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini beralasan sekali, karena implementasi mengikuti kebijakan apa yang dirumuskan berdasarkan paradigma yang telah diyakini oleh perumus kebijakan (Hill and Hupe 2014).

Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah (Winarno 2007). Kegiatan implementasi mencakupi tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Berkaitan dengan badan-badan pelaksana kebijakan, implementasi kebijakan mencakupi empat macam kegiatan. Pertama, badan-badan pelaksana yang ditugasi oleh undang-undang dengan tanggung jawab menjalankan program harus mendapatkan sumber-sumber yang dibutuhkan agar implementasi berjalan lancar. Kedua, badan-badan pelaksana mengembangkan bahasa anggaran dasar menjadi arahan-arahan konkrit, regulasi, serta rencana dan desain program. Ketiga, badan-badan pelaksana harus mengorganisasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan menciptakan unit-unit birokrasi dan rutinitas untuk mengatasi beban kerja. Keempat, badan-badan pelaksana memberikan keuntungan atau pembatasan kepada para pelanggan atau kelompok-kelompok target (Samodra 1994).

Grindle menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Ini artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, berarti ada kesalahan dalam analisis kebijakannya (Winarno 2007)

### **Model Implementasi Kebijakan Menurut Grindle**

Grindle berpendapat bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya sehingga konteks merupakan salah satu factor penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan suatu kebijakan dan konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasinya (Grindle 2017). Ide dasar Grindle adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Hal ini tergantung pada implementability dari program itu yang dapat dilihat pada isi dan konteks kebijakannya. Grindle bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sarana-sarana yang semula bersifat umum telah diperinci, program-program telah dirancang dan sejumlah biaya telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sarana-sarana tersebut. Hal inilah yang merupakan syarat-syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik apapun (Akib 2012).

Selanjutnya Grindle mengatkan bahwa tugas implementasi adalah membentuk kaitan yang memungkinkan sasaran kebijaksanaan publik dapat terealisasi sebagai hasil dari aktifitas pemerintah, implementasi mencakup penciptaan suatu policy delivery system dimana sarana yang spesifik dirancang dan dilaksanakan dengan harapan dapat sampai pada tujuan akhir yang dinyatakan dalam kebijaksanaan. Kemudian Grindle mempertegas kembali mengenai dua aspek tentang implementasi kebijakan yaitu (Grindle 2017):

Isi kebijakan meliputi : Kepentingan yang dipengaruhi (interest effected). Implementasi program akan ditentukan oleh seberapa jauh perubahan yang diinginkan oleh program atau mengancam kepentingan tertentu dalam masyarakat, kelompok masyarakat yang terancam oleh adanya perubahan cenderung menampilkan sikap pesan baik terbuka maupun terselubung. Agar ini tidak terjadi maka para pelaksana harus menghilangkan atau paling tidak meminimalisasikan ancaman atau melakukan pendekatan pada pihak-pihak yang dirugikan agar sikap mereka lebih cooperation. Apabila suatu program menjanjikan keuntungan yang jelas bagi publik, maka pendukung mudah diraih begitupun sebaliknya, untuk itu para pelaksana perlu membuat rencana yang paling jelas bagi kelompok sasaran dan meyakinkan terhadap keuntungan itu agar mereka itu berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Tipe Manfaat, program yang membawa manfaat secara kolektif akan mendapatkan dukungan terhadap implementasinya. Perubahan yang diharapkan (extent of change visioned), Semakin luas perubahan yang diharapkan demi kepentingan publik semakin baik dukungan yang mereka berikan, tapi apabila suatu kebijakan menuntut perubahan berdasar dari kelompok sasaran yang memang tidak terhindarkan, maka pelaksanaan program terlalu menerapkan secara lebih seksama bias dinetralisir dengan baik.

Jarak pengambilan keputusan (site of decision making) Keputusan kebijakan melibatkan kelompok kecil, pengambilan keputusan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah agar tidak terjadi miskordinasi. Pelaksana program (program implementator), Perlu ditentukan secara jelas siapa atau instansi mana yang secara fungsional akan dibebani sebagai pelaksana

tugas, kemudian apabila implementasi kebijakan bias berjalan efektif, maka aparat pelaksana perlu memiliki kemampuan plus dan dukungan oleh sumber daya memadai. Sumber daya yang digunakan (resources committed). Sumber daya yang digunakan adalah sumber daya dari program/proyek yang dialokasikan maupun sumber daya lokal.

Pada penelitian ini hanya akan berfokus pada empat aspek, yaitu: Aspek sumberdaya, aspek pelaksanaan program, aspek type manfaat serta aspek perubahan yang diharapkan. Hal ini karena hasil penelitian di lapangan, hanya keempat aspek inilah yang menjadi perhatian utama pada masing-masing informan.

### **Kampung KB**

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, Dusun atau yang setara dengan kriteria tertentu diimana terdapat keterpaduan program pembangunan antara program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program KKBPK dan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat (Hoeriah 2019).

Kampung KB merupakan salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan program KKBPK kepada masyarakat dengan mengakuyualisaskan 8 fungsi keluarga dan membangun karakter bangsa melalui perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera. Kampung KB menjadi salah satu model miniatur pelaksanaan program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN secara sinergis dengan kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan mitra kerja terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintah terendah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia (Restiyani and Yasa 2019). Kampung KB dibentuk sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan 14 untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sehingga dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas (Nurdiawan, Pratama, and Rahaningsih 2020).

### **Aspek Sumberdaya dan Pelaksanaan Program**

Pada aspek sumberdaya terdapat tiga subindikator untuk melihat proses keberhasilan program kampung KB, diantaranya adalah: sumberdaya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana prasarana. Aspek sumberdaya manusia adalah aspek utama untuk melihat sejauhmana sebuah program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pada pelaksanaan program kampung KB di lokasi penelitian, terlihat bahwa terdapat perbedaan mendasar terkait kemampuan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program.

Untuk wilayah kampung KB di daerah daratan yakni kampung KB kecamatan Bungoro memiliki kualitas sumber daya manusia cukup mumpuni dalam mengimplementasikan program tersebut. Hal ini dibuktikan dengan keterangan masyarakat terkait pelaksanaan dan pemahaman mereka tentang tujuan kampung KB dibentuk. Masyarakat dan penyuluh KB

di kecamatan ini dapat menjelaskan secara terstruktur tentang apa saja kegiatan yang pernah dan sedang dilakukan. Seperti halnya masyarakat, pimpinan kecamatan pun menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada program kampung KB tergolong tinggi. Camat Bungoro juga menegaskan bahwa masyarakat di wilayahnya terlihat antusias pada setiap kegiatan kampung KB. Sehingga kecamatan ini menjadi lokasi kampung KB percontohan untuk tingkat kabupaten.

Pada wilayah kepulauan, antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan program kampung KB juga tergolong tinggi. Dengan hadirnya kegiatan program kampung KB di wilayah kepulauan memberikan efek signifikan pada perubahan kebiasaan masyarakat, salah satu contoh adalah kesadaran masyarakat kepulauan untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berbeda halnya pada saat program kampung KB belum terealisasi, masyarakat kepulauan masih menganggap Pendidikan tinggi adalah hal mewah dan jauh dari jangkauan mereka, sehingga terindikasi salah satunya kepada masih terdapatnya kasus pernikahan dibawah usia perkawinan. Kebiasaan masyarakat kepulauan masih menganggap bahwa seorang perempuan ketika telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, telah cukup usia untuk melangsungkan proses pernikahan, begitupula dengan remaja pria, jika telah mampu membantu orangtua untuk ikut melaut, maka telah dianggap layak untuk membina rumah tangga. Sehingga angka pernikahan dini di wilayah kepulauan masih tergolong tinggi.

Hambatan utama pada proses implementasi program kampung KB utamanya di wilayah kepulauan adalah faktor Pendidikan. Para ibu dan remaja putri sebagai sasaran program adalah generasi masyarakat kepulauan dimasa lalu. Dominan dari mereka hanya mengenyam Pendidikan setingkat Sekolah Menengah, bahkan tak sedikit dari para ibu dan remaja putri hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar. Sehingga hambatan seperti kurangnya kepercayaan diri, sulitnya memahami istilah yang asing bagi mereka sampai kepada pemahaman atas pentingnya merubah mind set tentang Keluarga Berencana (pernikahan dini) menjadi hambatan tersendiri bagi para penyuluh KB diwilayah ini. Sehingga diharapkan dengan keberadaan program kampung KB ini, setidaknya dapat mengubah pola fikir masyarakat untuk dapat memberikan Pendidikan layak kepada generasi mereka. Bahkan diharapkan para pemuda kepulauan mendapat motivasi untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.

Sumber daya anggaran berperan penting dalam menyukseskan sebuah program. Alokasi anggaran untuk kegiatan kampung KB berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN). Ketersediaan anggaran adalah salah satu indikator keberhasilan sebuah program. Pelaksanaan program kampung KB secara umum di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan support anggaran yang cukup. Hal ini dibenarkan oleh salah satu pucuk pimpinan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan. Alokasi anggaran untuk setiap kegiatan program kampung KB menjadi perhatian utama, karena program ini adalah ujung tombak dari BKKBN mulai dari tingkat Provinsi sampai kepada tingkat Kabupaten. Distribusi anggaran salah satunya diperuntukkan untuk meningkatkan jumlah akseptor baru, tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menjadikan masyarakat binaan kampung KB menjadi mandiri dalam hal perekonomian. Secara teknis, alokasi anggaran

diperuntukkan untuk berbagai kegiatan penyuluhan, baik itu penyuluhan Kesehatan reproduksi, mengatur jarak kehamilan, bahaya stunting pada anak sampai kepada pembinaan remaja dengan slogan GENRE alias Generasi Berencana.

Pengadaan sarana dan prasarana juga dijadikan perhatian utama dalam proses implementasi kebijakan program kampung KB. Menghadirkan balai penyuluhan KB untuk setiap lokasi kampung KB, pembuatan gapura sebagai penanda tiap wilayah, serta penyediaan fasilitas smartphone untuk para penyuluh KB. Selain itu penyediaan sarana berupa alat peraga pada setiap kegiatan penyuluhan, menyiapkan konsumsi untuk para peserta penyuluhan pada setiap kegiatan adalah bentuk keseriusan pemerintah dalam menyukseskan program kampung KB ini. Salah seorang masyarakat mengatakan bahwa fasilitas penunjang dalam setiap kegiatan di lokasi kampung KB senantiasa membuat masyarakat antusias untuk mengikuti setiap program. Selain karena kelengkapan sarana, dukungan anggaran juga menjadi point kepuasan masyarakat untuk senantiasa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kampung KB. Karena dalam berbagai kesempatan, para peserta penyuluhan dan kader lapangan, mendapatkan pengganti dana transportasi setiap mengikuti kegiatan di wilayah kampung KB. Selain menyediakan balai pertemuan untuk masyarakat dan kader BKKBN, ketersediaan buku penyuluhan dan buku edukasi untuk keluarga juga difasilitasi. Hal ini dimaksudkan agar proses pembinaan kepada masyarakat khususnya kepada pasangan usia subur, dapat berjalan dengan maksimal. Ketersediaan Alat Permainan Edukatif (APE) untuk para balita dengan tujuan agar dapat membantu mengasah kecerdasan balita diusia dini, hal ini merupakan salah satu bentuk support pemerintah terhadap kesuksesan program kampung KB ini.

Namun, ketersediaan anggaran ternyata menjadi kendala tersendiri bagi beberapa wilayah kampung KB. Terkhusus kepada kampung KB yang tidak memiliki sumber daya manusia mumpuni. Kreatifitas dan inovasi para penyuluh lapangan dalam mengelola anggaran untuk setiap kegiatan diharapkan semakin meningkat dengan adanya peningkatan anggaran untuk program ini. Wilayah kampung KB dengan kategori sedang bahkan dibawah rata-rata pada umumnya dikarenakan oleh rendahnya tingkat kreatifitas dan inovasi sumber daya manusianya. Kegiatan monoton dan reduplikasi menjadikan masyarakat enggan untuk mengikuti program selanjutnya. Hal ini mengakibatkan aktifitas kampung KB diwilayah tersebut menjadi kurang menarik dan ini akan menunjukkan hasil kurang maksimal pada proses evaluasi program.

#### **Aspek type manfaat dan perubahan yang diharapkan.**

Keberadaan kampung KB mendapatkan tanggapan positif baik dari masyarakat ataupun pemerintah setempat. Bentuk support dan dukungan pemerintah dalam hal ini pemerintah kecamatan sangat positif. Hal ini terbukti dengan keterangan Camat Bungoro perihal keberadaan kampung KB diwilayahnya. Kampung KB banyak membantu masyarakat dalam berbagai hal, salah satu diantaranya adalah adanya perubahan pola pikir masyarakat tentang lingkungan. Selain itu kampung KB juga telah terbukti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam hal peningkatan sumber pendapatan tambahan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga selain mengharapakan penghasilan utama dari suami. Menurut Camat, dampak paling signifikan dari kegiatan kampung KB ini adalah karena dalam

pelaksanaannya kegiatan kampung KB tidak hanya melibatkan penyuluh KB saja, tetapi menggandeng mitra lainnya, baik itu sesama satuan kerja perangkat dinas dalam lingkup pemerintah kabupaten dan kecamatan maupun mitra diluar lingkup pemerintah. Terdapat perubahan mendasar, saat awal pencairan beberapa staf pemerintah beranggapan bahwa program yang akan dilaksanakan di wilayah kampung KB hanyalah program Keluarga Berencana saja, dengan melihat brand “Kampung KB” tersebut. Ternyata dalam perjalanannya, selain kegiatan inti dari program Keluarga Berencana, juga terdapat program lainnya seperti kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, makanan sehat untuk keluarga sampai kepada kegiatan pemberdayaan untuk membantu meningkatkan taraf hidup keluarga. Secara teknis kegiatan kampung KB di wilayah kecamatan Bungoro bekerjasama dengan CSR PT. Semen Tonasa dengan cara; beberapa limbah perusahaan diolah oleh masyarakat dibawah binaan program kampung KB untuk diubah menjadi produk bernilai ekonomis tentunya dengan dengan bantuan permodalan dari perusahaan. Setelah produk tersebut jadi. Maka perusahaan kembali membantu masyarakat dalam hal proses promosi dan penjualan ke mitra-mitra perusahaan lainnya. Sehingga terjadi perubahan cukup signifikan dalam hal kesejahteraan masyarakat. Selain di wilayah daratan, hal ini juga terjadi untuk kampung KB di wilayah kepulauan. Masyarakat pulau mendapatkan pendampingan pengolahan hasil laut oleh salah satu perusahaan pengeksport daging kepiting. Hasil tangkapan kepiting nelayan dibeli oleh perusahaan dan mendistribusikan kepada kelompok ibu-ibu kampung KB untuk diolah dan dipisahkan dagingnya. Hasil olahan daging kepiting tersebut kemudian dibeli kembali oleh fihak perusahaan.

Kegiatan rutin pertemuan di rumah data. Hambatan khusus masalah lingkungan, beberapa warga cenderung menentang anjuran penyuluh untuk memilah sampah. Sampah rumah tangga berupa sampah organik dan sampah plastic atau non organik. Dengan alasan, para ibu rumah tangga merasa kerepotan dengan aktifitas memilah sampah tersebut ditengah kesibukan mengurus rumah tangga, apalagi dimasa pandemic, para ibu rumah tangga memiliki pekerjaan ekstra untuk mendampingi anak untuk sekolah online. Namun dengan kesabaran para penyuluh KB dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Akhirnya beberapa rumah tangga sudah terlihat memisahkan sampah organiknya untuk dijadikan pakan hewan peliharaan dan sampah non organik dikumpulkan untuk kemudian diserahkan kepada pengumpul barang bekas untuk ditukar dengan bahan kebutuhan rumah tangga seperti piring, sendok, baskom dan barang rumah tangga sederhana lainnya. Hal sama terlihat untuk aktifitas kampung KB diwilayah kepulauan. Limbah cangkang kepiting hasil pengolahan untuk perusahaan, pada mulanya dibuang langsung ke laut. Tapi setelah berbagai pembinaan oleh penyuluh KB sebagai salah satu program kampung KB. Maka limbah cangkang kepiting tadi diolah kembali untuk dijual kepada masyarakat dan perusahaan tertentu di daratan. Cangkang kepiting bagian atas masih memiliki telur dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah daratan. Sedangkan bagian limbah kepiting lainnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber kalsium.

Oleh perusahaan, limbah tersebut dapat diolah menjadi bahan baku tambahan untuk makanan. Salah satu jenis pangan yang dibuat dari bubuk cangkang kepiting seperti biscuit, tepung perasa makanan bahkan dalam pembuatan mie instant juga memerlukan kalsium dari

cangkang kepiting ini. Hasil penelitian dari team riset Universitas Padjajaran Bandung memperlihatkan bahwa kandungan bahan kimia sehat dari tepung cangkang kepiting terdiri dari kadar air 5,38% (bb), abu 57,26% (bk), lemak 2,38% (bk), protein 13,62% (bk) serta karbohidrat 28,67% (by difference). Sedangkan komponen kadar abu pada cangkang kepiting memiliki kadar tertinggi yaitu mengandung 57,26% bk. Sehingga nilai ekonomis limbah cangkang kepiting mengandung mineral yang tinggi. Para ibu rumah tangga selain mendapatkan sharing provit dari kerja mereka memisahkan daging kepiting, cangkang kepiting yang mereka kumpulkan dapat menjadi sumber penghasilan lain. Ini menjadi tujuan utama dari program pemberdayaan kampung KB. Karena bukan hanya melindungi lingkungan dengan tidak membuang limbah lagi di laut, tetapi limbah tersebut menjadi sumber income baru bagi keluarga.

## Penutup

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pada awal program kampung KB dicanangkan di wilayah penelitian, masyarakat cenderung belum antusias dalam mengikuti setiap kegiatan. Namun setelah melihat banyak kelebihan dari program ini, masyarakat berbondong-bondong untuk aktif dan berpartisipasi pada program kampung KB.

Pada aspek sumber daya manusia, terdapat perbedaan mendasar antara masyarakat di wilayah daratan dan masyarakat di wilayah kepulauan. Masyarakat kepulauan masih merasa rendah diri untuk berinovasi dan mengembangkan potensi secara mandiri, hal ini dikarenakan kelompok ibu dan remaja putri dimasa lalu masih mengenyam Pendidikan sampai ke tingkat Pendidikan menengah, bahkan dasar. Namun dewasa ini para generasi muda di wilayah kepulauan telah berusaha untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia mereka. Orang tua telah mendapatkan kesadaran akan pentingnya Pendidikan tinggi bagi generasi mereka. Sehingga diprediksi beberapa tahun kedepan, kualitas sumber daya manusia kepulauan telah sanggup bersaing dengan sumber daya manusia di wilayah daratan. Dalam hal sumber daya anggaran dan sarana prasarana, pemerintah pusat maupun provinsi telah memberikan support maksimal untuk program kampung KB. Ketersediaan anggaran yang cukup signifikan diharapkan dapat menjadi trigger bagi para penyuluh KB lapangan untuk dapat memaksimalkan setiap program kampung KB diwilayahnya masing-masing.

Pada aspek type manfaat dan perubahan yang diharapkan, keberadaan kampung KB untuk kedua lokasi memberikan perubahan signifikan, khususnya pada pola pikir masyarakat terhadap lingkungan. Program kampung KB secara perlahan mengubah perilaku masyarakat untuk memilah sampah dan menjadikan limbah rumah tangga serta limbah industri menjadi produk bernilai ekonomis. Program kampung KB bukan hanya menjalankan program dari BKKBN, tetapi program ini menggandeng mitra dalam pelaksanaannya. Selain bermitra dengan SKPD pada lingkup pemerintah kabupaten maupun provinsi. Program ini juga menjalin mitra Kerjasama dengan fihak korporasi. Salah satu mitra korporasi pada wilayah kampung KB ini adalah PT. Semen Tonasa.

Kekurangan program kampung KB sesuai dengan hasil penelitian, terdapat pada aspek sumber daya manusia. Dengan alokasi anggaran dan dukungan sarana prasarana dari

pemerintah pusat maupun provinsi, penyuluh KB diharapkan dapat lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan program ini. Karena kondisi di lapangan, para penyuluh KB terkesan dimanjakan oleh keberlimpahan anggaran. Kegiatan di kampung KB masih terkesan monoton dan hanya merepetisi kegiatan sebelumnya. Padahal harapan dari pimpinan BKKBN Provinsi adalah agar tercipta kegiatan baru yang lebih inovatif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Secara umum penelitian ini masih terdapat kekurangan, salah satu diantaranya adalah para informan memberikan keterangan hampir seragam, rata-rata informan enggan membeberkan hambatan dan kekurangan dari program kampung KB ini. Selain itu pada aspek metodologi. Pemilihan lokasi hanya berdasarkan

## Referensi

- Akib, Haedar. 2012. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1(1):1. doi: 10.26858/jiap.v1i1.289.
- Bachtiyar, Nosa Arighi, and Sri Wibawani. 2017. "Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Dusun Ambeng-Ambeng Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo." *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 7(1). doi: 10.33005/JDG.V7I1.1194.
- BKKBN Sulawesi Selatan. 2020. "Rencana Strategis Perwakilan BKKBN Prov Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024."
- Grindle, Merilee S. 2017. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hill, Michael, and Peter Hupe. 2002. *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. Sage.
- Hill, Michael, and Peter Hupe. 2014. *Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance*. Sage.
- Hoeriah, Riski. 2019. "Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Di Kampung Kaliwadas Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Istiadi, A. 2017. "Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Studi Pada Kelompok Sasaran Keluarga Dengan Remaja Di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk).[Internet].[Diunduh Tanggal 7 September 2018]." *Dapat Diunduh Di: Http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/20687/18965*.
- Lettiyani, Elsa, Isabella Isabella, and Novia Kencana. 2020. "Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT)." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 5(3).
- Nurdiawan, Odi, Fidyah Arie Pratama, and Nining Rahaningsih. 2020. "PKM E-Commerce Kampung Keluarga Berencana Desa Mertasinga Kabupaten Cirebon." *Madani: Indonesian Journal of Civil Society* 2(1):1-8.
- Ramadhani, Nur Fitria. 2020. "Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Kota Surabaya."
- Restiyani, Ni Luh Novi, and IGWM Yasa. 2019. "Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kota Denpasar." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 8(7):711-40.
- Rosidah, Afyatur. 2018. "Makna Program Kampung Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Di Kecamatan Bangil."

- Samad, Ahsan, Erdiansyah Erdiansyah, and Rina Wulandari. 2020. "Evaluasi Kebijakan Pemerintah Pasca Bencana (Studi Kasus Bencana Di Sulawesi Tengah)." *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 9(1):15–24. doi: 10.31314/PJIA.9.1.15-24.2020.
- Samodra, Wibawa. 1994. "Kebijakan Publik Proses Dan Analisis." *Jakarta: Intermedia*.
- Sukino, Widarti Gularsih, Muhammad Ahsan Samad, Nasir Mangngasing, and Abdul Rivai. 2019. "Manajemen Mitigasi Bencana Kota Palu Palu City Disaster Mitigation Management." *Journal of Public Administration and Government* 1(2):1–8. doi: 10.22487/JPAG.V1I2.26.
- Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia." *Yogyakarta: Penerbit Gava Media*.
- Widodo, Mohamad Noviar, and Moh Khoirul Anam. 2019. "Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana Di Wilayah Cilenggang." in *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMM*.
- Winarno, Budi. 2007. "Kebijakan Publik: Teori Dan Proses." *Yogyakarta: Media Pressindo*.
- Zuhriyah, Aminatuz, Sofwan Indarjo, and Bambang Budi Raharjo. 2017. "Kampung Keluarga Berencana Dalam Peningkatan Efektivitas Program Keluarga Berencana." *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* 1(4):1–13.